

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENERIMA INVESTASI NIKEL DARI CHINA PADA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

PRETTY GABY LAUDYA

21323300

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENERIMA INVESTASI NIKEL DARI CHINA PADA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

PRETTY GABY LAUDYA

21323300

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menerima Investasi
Nikel Dari China Pada Tahun 2020-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
- 3 Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 14 Mei 2025



Pretty Gaby Laudya

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Cakupan penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	17
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	17
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	17
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 DETERMINAN POLITIK DOMESTIK	19
2.1. Bureaucratic Influencers (Birokrat yang Mempengaruhi)	21
2.2. Partisan Influencers (Partai yang Mempengaruhi)	26
2.3. Interest Influencers (Kepentingan yang Mempengaruhi)	30
2.4. Mass Influencers (Opini Publik)	32
BAB 3 DETERMINAN KONDISI EKONOMI DAN KONTEKS INTERNASIONAL	38
3.1. Subdeterminan Ekonomi	38
3.2. Subdeterminan Konteks Internasional	41
3.2.1. <i>Faktor Geografis</i>	42

3.2.2. <i>Faktor Ekonomis</i>	43
3.2.3. <i>Faktor Politis</i>	45
BAB 4	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2 Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dominasi Investasi Nikel di Pulau Sulawesi dan Maluku	4
Tabel 2. Jumlah Berita dari Media Arus Utama dan Investigatif Mengenai Tambang dan Smelter Nikel	33
Tabel 3. Perbedaan Opini Aktor Terhadap Smelter Nikel	34
Tabel 4. Performa GDP, GNI & FDI Indonesia 2018-2022	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pergerakan pemberitaan industri nikel 2020-2023	33
Grafik 2. Realisasi Investasi China ke Indonesia dalam US\$	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rincian FDI Tahunan Indonesia	5
Gambar 2. Peta Teori Decision Making	13

DAFTAR SINGKATAN

SDGs	: Sustainable Development Goals
WTO	: World Trade Organization
FDI	: Foreign Direct Investment
GDP	: Gross Domestic Product
GNI	: Gross National Income
APNI	: Asosiasi Penambang Nikel Indonesia
IMF	: International Monetary Fund
BRI	: Belt and Road Initiative
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
BPS	: Badan Pusat Statistik
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
CATL	: Contemporary Amperex Technology Co Limited
IWIP	: Indonesia Weda Bay Industrial Park
IMIP	: Indonesia Morowali Industrial Park
CNBC	: Consumer News and Business Channel

ABSTRAK

Di tengah gencarnya upaya Indonesia dalam hilirisasi nikel dan menggandeng China sebagai mitra utama, muncul permasalahan serius terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Ini menjadi pertanyaan mengapa pemerintah Indonesia tetap menerima investasi ini. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini akan meninjau faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan Indonesia tetap menerima investasi nikel China menggunakan teori *decision making* yang dikembangkan oleh William D. Coplin. Teori tersebut mengidentifikasi faktor-faktor dalam tiga determinan utama, yaitu faktor politik dalam negeri, konteks internasional, dan kondisi ekonomi & militer sehingga timbul temuan-temuan, seperti peran kelompok birokrasi, partai, kelompok kepentingan, dan opini publik. Serta ketergantungan Indonesia pada investasi ekonomi dan pengaruh konteks lingkungan global menjadikan alasan Indonesia tetap melanjutkan kebijakan menerima China dalam Investasi nikel.

Kata-kata kunci: Investasi Nikel, Kebijakan Pemerintah, China, Hilirisasi, *Decision Making*.

ABSTRACT

Amidst Indonesia's intensive efforts in nickel downstreaming and collaborating with China as its main partner, serious problems have emerged regarding the environmental impacts caused. This raises the question of why the Indonesian government continues to accept this investment. Therefore, this qualitative study will review the factors that influence Indonesia's decision-making to continue accepting Chinese nickel investment using the decision-making theory developed by William D. Coplin. The theory identifies these factors in three main determinants, namely domestic political factors, international context, and economic & military conditions so that findings emerge, such as the role of bureaucratic groups, parties, interest groups, and public opinion. As well as Indonesia's dependence on economic investment and the influence of the global environmental context are the reasons for Indonesia to continue its policy of accepting China in nickel investment.

Keywords: *Nickel Investment, Government Policy, China, Downstream, Decision Making.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis terhadap industri pertambangan dengan melarang ekspor nikel mentah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel melalui program hilirisasi nikel (Direktorat Statistik Industri 2022). Hal ini merupakan implementasi dari Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang pelarangan ekspor nikel yang menjadi awal transisi kebijakan hilirisasi dan mendorong masuknya investasi asing. Menurut data dari *United States Geological Survey* (USGS), Indonesia memiliki cadangan nikel nomor satu di dunia dengan 2,67 juta ton produksi nikel di dunia, produksi nikel Indonesia lebih dari 800 ribu ton dibandingkan dengan negara lain (Media Nikel Indonesia 2020).

Sebelum kebijakan hilirisasi nikel diterapkan, Indonesia telah lama menjalin kemitraan yang erat dengan China dalam sektor pertambangan, termasuk nikel. Kolaborasi ini bermula pada awal 2000 an, saat China mulai menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap kekayaan sumber daya mineral Indonesia. Pada tahun 2009, kedua negara menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama yang mencakup investasi dalam pembangunan infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan nikel. Salah satu momen penting dalam sejarah kerja sama ini adalah didirikannya kawasan industri terpadu di Morowali, Sulawesi Tengah pada tahun 2013. Proyek ini dipimpin oleh Tsingshan Holding Group, perusahaan besar dari

China, bekerja sama dengan mitra lokal Bintang Delapan Group (Rosada et al. 2023).

Meskipun tidak terdapat satu perjanjian resmi yang secara khusus menandai dimulainya dominasi investasi China di industri hilirisasi nikel Indonesia, mula masuknya China ini muncul sebagai respons strategis terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku sejak Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Sebelumnya, banyak perusahaan China hanya mengimpor bijih mentah dari Indonesia, namun setelah kebijakan tersebut diterapkan, mereka mulai menanamkan investasi secara langsung melalui pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan nikel di dalam negeri (CSIS 2024).

Berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM, pada tahun 2020 Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 2,6 miliar ton dengan estimasi masa pakai mencapai 27 tahun. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Geologi pada Juli 2020 menunjukkan bahwa total sumber daya bijih nikel di Indonesia mencapai sekitar 11.887 juta ton, sementara total cadangannya berada di angka 4.346 juta ton. Potensi ini menunjukkan bahwa sektor nikel memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi. Selain itu, produksi nikel Indonesia diperkirakan mencapai 1,6 juta ton pada tahun 2022, dengan total cadangan mencapai kurang lebih 21 juta ton (Ahdia 2023).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor nikel dan produk olahannya pada tahun 2022 mencapai sekitar 777.411,8 ton mengalami lonjakan tajam sebesar 369,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai ekspor komoditas ini juga mencatat rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir (BPS, 2023). Peningkatan ini berkaitan dengan melonjaknya permintaan global

terhadap kendaraan listrik, mengingat nikel merupakan komponen kunci dalam produksi baterai kendaraan tersebut. Pada tahun yang sama, China menjadi negara tujuan utama ekspor nikel Indonesia dengan nilai sebesar US\$ 4,49 miliar. Sementara itu, Jepang menerima ekspor senilai US\$ 1,24 miliar, diikuti oleh Korea Selatan US\$ 106,99 juta, Norwegia US\$ 61,87 juta, dan Singapura US\$ 1,08 juta (CNBC INDONESIA 2022).

Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan keuntungan dari sumber daya alam ini. Dengan menggunakan kebijakan hilirisasi nikel, Indonesia dapat mengoptimalkan nilai tambah dari hasil tambang nikelnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara. Program hilirisasi ini akan meningkatkan nilai tambah produk nikel dan membuka peluang investasi baru dalam industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri.

Selain itu, dengan melarang ekspor nikel mentah, Indonesia juga mengurangi potensi kerugian akibat harga jual yang murah. Langkah ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia untuk pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mendorong pengembangan industri hilirisasi nikel di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang sering disebabkan oleh eksploitasi tambang nikel. Pengolahan nikel secara lebih lanjut di dalam negeri dapat dilakukan dengan standar lingkungan yang lebih ketat, sehingga dampak negatif lingkungan dapat diminimalisir (Kompas Data 2018).

Adapun wilayah yang memiliki sumber daya alam nikel terbesar di Indonesia meliputi Pulau Sulawesi dan Maluku Utara. Dalam rentang tahun 2020-2023, investasi asing langsung di provinsi-provinsi yang kaya akan nikel ini

menunjukkan angka yang cukup besar. Sulawesi Tengah mencatat nilai investasi tertinggi, mencapai USD 16 miliar, diikuti oleh Maluku Utara dengan USD 11,3 miliar. Sementara itu, Sulawesi Tenggara menerima investasi sebesar USD 6,1 miliar, dan Sulawesi Selatan mendapatkan USD 2,6 miliar. Jika dihitung secara keseluruhan untuk wilayah Pulau Sulawesi, yang mencakup tiga provinsi utama penghasil nikel, total investasi asing yang masuk mencapai USD 24,7 miliar (Djamhari et al. 2024).

Selain itu, jika dibandingkan Korea Selatan, Kanada, Australia dan Amerika Serikat, China merupakan negara yang paling mendominasi dalam investasi nikel di wilayah kaya nikel Indonesia. Hal ini termasuk pendanaan dalam kepemilikan konsesi tambang, smelter, dan bahkan pengembangan infrastruktur pendukung. Lonjakan ini terlihat jelas ketika kebijakan hilirisasi dikeluarkan, China merupakan investor terbesar. Bisa di lihat dari tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Dominasi Investasi Nikel di Pulau Sulawesi dan Maluku

Negara & Tahun	2019	2020	2021	2022
China	2,3 miliar	2,4 miliar	1,9 miliar	3,2 miliar
Korea Selatan	16,9 juta	231.100	6 juta	719.600
Australia	2,3 juta	23,4 juta	28,1 juta	17,8 juta
Kanada	166,4 juta	159,1 juta	168,8 juta	141,9 juta
Amerika Serikat	775.300	1,2 juta	363.200	11,2 juta
Total	2,5 miliar	2,6 miliar	2,1 miliar	3,4 miliar

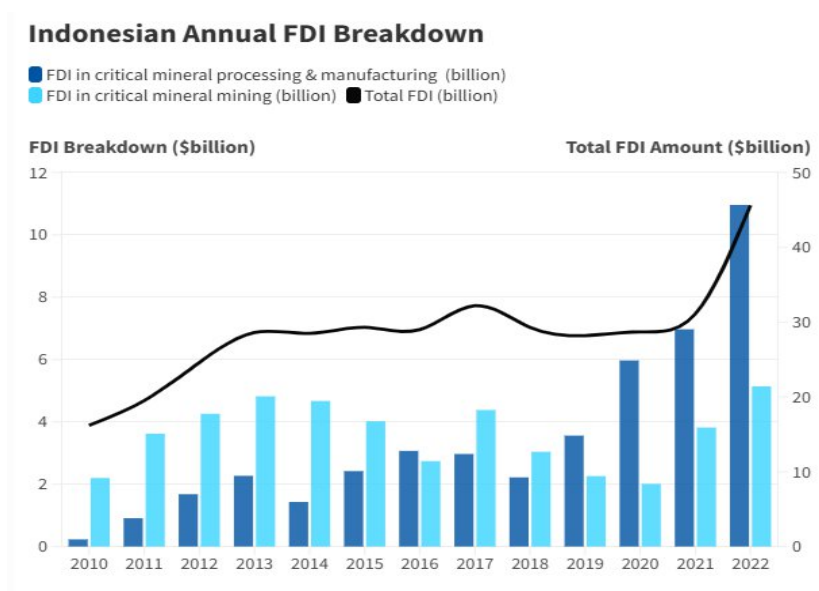
Sumber: Djamhari et al. (2024)

Sebagai negara yang menjadi investor paling besar di industri nikel Indonesia saat kebijakan hilirisasi nikel diluncurkan, China memiliki industri besar yang bergantung pada nikel untuk pengolahan dan produksinya. Demi memastikan pasokan nikel yang stabil dan berkualitas tinggi, China berinvestasi langsung maupun anak perusahaan di Singapura dan Hong kong. Kebijakan ini sukses

menarik investasi China, sehingga dana utama untuk pengembangan industri pengolahan nikel di Indonesia berasal dari implementasi kebijakan tersebut.

Selama pemerintahan Jokowi, investasi dari China dan Hong Kong meningkat pesat, sejalan dengan program hilirisasi yang disebutkan. Kedua negara China dan Hong Kong ini hanya menyumbang 5,1% dari total investasi asing di Indonesia pada 2014. Persentasenya terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2023 dengan 30,1%, setelah sedikit anjlok ke 28,6% di tahun sebelumnya. Akibatnya, sektor industri smelter nikel berkembang pesat dengan perkiraan 90% berasal dari China (Singgih 2024).

Gambar 1. Rincian FDI Tahunan Indonesia



Sumber: CSIS (2024)

Data penanaman modal asing di atas terlihat jelas di mana sejak tahun 2020, investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan yang tajam. Investasi mendorong pertumbuhan industri Indonesia di mana sebelum tahun 2014 hanya 2 pabrik smelter yang beroperasi di Indonesia, tahun 2020 ada 13 smelter dan 2023 mengalami peningkatan besar yakni 95 smelter yang aktif maupun dalam

perencanaan. Dengan 90 persen pendanaan industri hilirisasi nikel berasal dari China (CSIS 2024).

Dari 95 smelter terdapat 248 tungku smelter, yang dimana sebanyak 137 tungku terafiliasi dengan investor asal China. Oleh karena itu, penggunaan bijih nikel dalam negeri diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun mendatang dengan estimasi mencapai 400 juta ton pada tahun 2025. Saat ini, Pemerintah Indonesia memanfaatkan nikel untuk program hilirisasi, di mana sebelumnya Indonesia hanya mengekspor bijih nikel mentah, kini diolah menjadi produk seperti *feronikel*, *nickel matte*, dan *nickel pig iron* (NPI) (Gading 2024).

Investor China yang paling dominan di Indonesia adalah Tsingshan Holding Group yang dimana memasuki Indonesia setelah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Bintang Delapan Group, perusahaan lokal, untuk memulai pengembangan kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, dimulai pada awal Oktober 2013 dan bertepatan dengan lawatan resmi Presiden China, Xi Jinping ke Indonesia. Proyek ini menjadi bagian dari kerja sama ekonomi yang terkait dengan inisiatif global China, yaitu BRI (Belt and Road Initiative) yang diumumkan oleh Xi Jinping hanya satu bulan sebelumnya (Gading 2024).

Pengelolaan Kawasan Industri Morowali berada di bawah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Di kawasan ini terdapat tiga jenis fasilitas pengolahan nikel, yakni untuk produksi baja nirkarat, baja karbon, dan material baterai kendaraan listrik. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, perusahaan asal China Tsingshan, tercatat memiliki kepemilikan saham sebesar 66,25% di PT IMIP. Sementara itu, 33,75% sisanya dimiliki oleh PT Bintang Delapan Investama yang merupakan bagian dari Bintang Delapan Group.

Di sisi lain, sejak tahun 2018, Tsingshan juga menggandeng sejumlah mitra asal China untuk mengembangkan kawasan industri lain, yaitu Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang hingga tahun 2022 ditargetkan mencakup area seluas 5.000 hektar dengan total investasi mencapai USD 15 miliar (Purwanti 2022).

Terlepas dari itu, industri pertambangan China sebenarnya banyak mendapatkan kritik global akibat dampak lingkungan dan sosialnya. Di dalam negeri, operasi pertambangan China sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan serius seperti pencemaran, deforestasi, dan kerusakan habitat satwa liar. Secara internasional, investasi China dalam pertambangan di Afrika dan Amerika Latin sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan konflik dengan komunitas lokal (Roger 2022). Misalnya, aktivitas tambang China di Zambia menyebabkan pencemaran air dan tanah yang merusak ekosistem dan kehidupan warga lokal. Di Papua Nugini dan Myanmar, investasi China menyebabkan pencemaran sungai, deforestasi, dan bentrokan dengan masyarakat setempat (Mukete, n.d.). Di Peru, tambang yang dikelola oleh perusahaan China dikenal karena deforestasi yang signifikan dan pencemaran sumber air komunitas lokal (Earthorg 2020).

Masuknya investasi dari China ke Indonesia, terutama selama masa jabatan Presiden Joko Widodo, berperan dalam memperparah kerusakan lingkungan di kawasan industri nikel. Organisasi Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mencatat adanya berbagai konflik lahan yang muncul di sekitar area pertambangan dan smelter, termasuk di wilayah Morowali, Sulawesi, dan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Meski kedua lokasi ini tumbuh menjadi pusat

produksi nikel nasional, masyarakat setempat justru mengalami tekanan besar akibat hilangnya lahan garapan dan semakin sulitnya mencari sumber penghidupan (Singgih 2024).

Di berbagai wilayah desa yang terkena dampak, kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit karena kehilangan lahan perkebunan, rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang, serta lenyapnya hutan mangrove di daerah pesisir akibat proyek reklamasi. Pembangunan infrastruktur besar seperti bandara, kantor perusahaan, hingga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menunjang operasional smelter juga menyebabkan wilayah tangkap nelayan menjadi lebih jauh dan sulit dijangkau. Keberadaan PLTU bahkan memperparah kondisi lingkungan, khususnya kualitas udara. Di Desa Fatufia, Morowali, warga menghadapi paparan debu setiap hari, sementara di Halmahera Tengah, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak drastis dari sekitar 300 kasus menjadi antara 800 hingga 1.000 kasus per tahun sejak PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mulai beroperasi hingga pertengahan 2023 (Singgih 2024).

Selain itu, tambang nikel di Indonesia juga menyebabkan deforestasi hingga 78.948 hektare sejak 2014, yang berkontribusi pada perubahan iklim, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tata kelola penambangan dan pengolahan nikel yang buruk juga berdampak pada perlindungan tenaga kerja, seperti yang terjadi ketika tungku smelter di Kawasan Industri Morowali meledak pada 24 Desember 2023, menewaskan setidaknya 21 orang dan melukai 38 lainnya (Kompas Data 2018).

Dengan adanya fakta bahwa investasi nikel oleh China tidak sepenuhnya sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menerapkan investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, maka dari itu fokus penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Indonesia tetap menerima investasi tersebut meskipun pada akhirnya merusak lingkungan. Hal ini akan melihat bagaimana keputusan pemerintah Indonesia terkait investasi dari China dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut, dari segi *decision making*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika di balik kebijakan investasi nikel Indonesia-China.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah Indonesia tetap menerima investasi nikel dari China meskipun kebijakan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia dalam menerima investasi nikel dari China meskipun menimbulkan kerusakan lingkungan.
2. Untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor yang menjadi alasan pemerintah Indonesia tetap menerima investasi nikel dari China meskipun kebijakan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan. Batasan waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan hilirisasi nikel. Kebijakan ini menjadi tonggak awal proses hilirisasi nikel yang kemudian menjadi pembuka pintu bagi investor masuk terutama China. Pada fase inilah dimana Indonesia mulai mempertimbangkan terkait investasi dari mana saja yang masuk.

Dan di akhiri tahun 2023 karena merupakan fase ketika hasil nyata dari rangkaian kebijakan dan keputusan pemerintah mulai terlihat secara signifikan. Dalam kerangka analisis pengambilan keputusan (*decision making*), penerimaan investasi China bukanlah keputusan sesaat, melainkan proses bertahap yang berlangsung sejak kebijakan awal dikeluarkan. Tahun 2023 menandai puncak dari proses tersebut, di mana data menunjukkan bahwa sekitar 90% investasi smelter nikel di Indonesia telah didominasi oleh China. Hal ini memperlihatkan hasil akhir dari keputusan yang telah dibuat pemerintah, serta menunjukkan arah kebijakan yang semakin kuat berpihak pada kerja sama ekonomi dengan China di sektor strategis yakni nikel.

Adapun cakupan wilayah dalam penelitian ini berfokus pada dua lokasi utama penghasil nikel di Indonesia, yakni Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah dan wilayah Halmahera di Provinsi Maluku Utara. Kedua wilayah ini dipilih karena menjadi pusat aktivitas industri smelter yang sebagian besar dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal China. Meskipun menjadi penyumbang investasi terbesar dalam sektor nikel, berbagai laporan telah menunjukkan bahwa sejumlah

besar pabrik smelter China di dua wilayah ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius serta berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sebagai landasan dari kerangka pemikiran, penelitian ini akan menggunakan teori pengambilan keputusan (*decision making*) dengan menekankan pada tiga faktor utama: konteks internasional, dinamika politik domestik, serta kondisi ekonomi dan militer Indonesia dalam kurun waktu 2020–2023.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian Luttrell dan Resosudarmo yang membahas bahwa investasi asing dalam sektor ekstraktif sering kali membawa tantangan lingkungan yang signifikan serta menciptakan ketergantungan pada pasar asing untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dalam konteks ini, keterlibatan perusahaan asing, termasuk yang berasal dari China, dapat mempengaruhi kebijakan sektor mineral dan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam menarik investasi asing dapat berdampak pada kematian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Luttrell and Resosudarmo 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Septa Dinata dkk menunjukkan bahwa investasi China di industri nikel Indonesia memberikan dampak yang beragam, baik dari bidang ekonomi maupun tata kelola pemerintahan. China tiba di Indonesia dengan sejumlah besar uang tunai untuk mengembangkan industri hilir pertama Indonesia dan mendukung perolehan pendapatan yang lebih besar dari penjualan bahan olahan, dibandingkan dengan penjualan bahan mentah yang ditambang untuk ekspor. Dalam jangka panjang, keuntungan minimal ini tidak akan cukup untuk mengelola kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri pertambangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah

memperingatkan pemerintah dan komunitas bisnis tentang kegagalan investor China untuk memenuhi kewajiban mereka untuk keberlanjutan lingkungan (Dinata et al. 2020).

Yang terakhir yakni penelitian oleh M Roehman Zainur Riedho yang membahas tentang dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia sejak 2020 dan bagaimana China memanfaatkan situasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan nikel domestiknya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa China menerapkan strategi investasi dan ekspansi melalui perusahaan-perusahaan besar seperti Tsingshan Group, yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam skema *joint venture* di kawasan industri strategis. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran perbankan China dalam mendanai investasi ini. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana kerja sama antara Indonesia dan China, yang didukung oleh program nasional kedua negara seperti *Belt and Road Initiatives* (BRI) dan Poros Maritim Dunia, berhasil meningkatkan hubungan bilateral dan ekonomi (Riedho 2024).

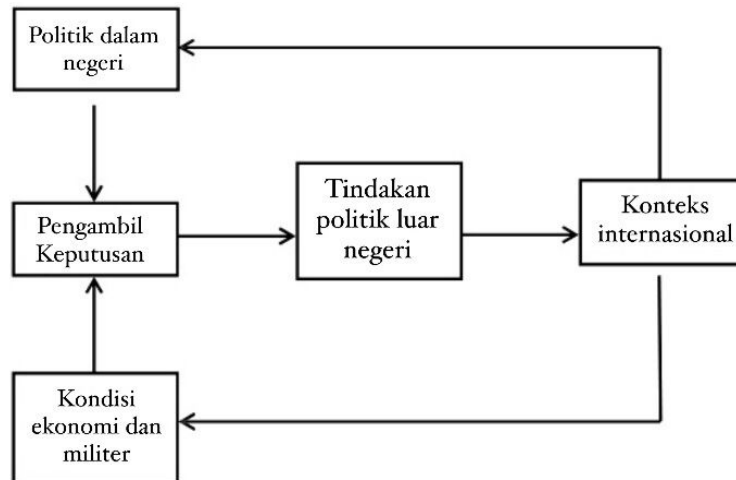
Berdasarkan jurnal penelitian di atas, telah banyak meneliti dan membahas isu dampak investasi asing, terutama dari China dalam sektor pertambangan di Indonesia serta tantangan lingkungan yang dihadapi. Namun dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik mengapa Indonesia tetap menerima investasi nikel dari China meskipun pada kenyataannya sudah banyak rekam jejak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan asing China ini. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan sudut pandang dan subjek berbeda yang mana akan menjelaskan faktor tetap dikeluarkannya kebijakan Indonesia tersebut dengan menggunakan teori *Decision Making*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pasca berakhirnya Perang Dingin, investasi asing telah menjadi salah satu isu yang berkembang dalam politik ekonomi internasional. Saat ini, banyak negara yang bersaing untuk menarik investasi asing demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi salah satu tujuan utama investasi nikel oleh China. Tentunya dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri ini memiliki proses yang sangat panjang sampai pada akhirnya Indonesia menerima China sebagai investor utama. Penelitian ini akan menggunakan teori *decision making* dari William D Coplin untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerima investasi nikel oleh China tahun 2020-2023 (Coplin 2003).

Coplin mengatakan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi penilaian kebijakan luar negeri suatu negara yakni faktor politik domestik, kondisi militer dan ekonomi serta konteks internasional. Dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Politik Internasional", Coplin menyatakan bahwa orientasi kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk oleh ketiga komponen tersebut yang berinteraksi satu sama lain negeri (Coplin 2003).

Gambar 2. Peta Teori Decision Making



Sumber: Coplin (2003)

Pertama, William D. Coplin berpendapat bahwa situasi dalam negeri suatu negara berpengaruh besar terhadap kebijakan luar negerinya. Kebijakan tersebut dihasilkan melalui proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kelompok berkepentingan dalam negeri, yang disebut sebagai *policy influencers*. Coplin mengidentifikasi empat kategori utama dari *policy influencers* ini. Pertama, *bureaucratic influencers* adalah individu atau organisasi dalam lembaga eksekutif yang membantu pemimpin utama, seperti presiden, dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Kedua, *partisan influencers* yang mengubah tuntutan masyarakat menjadi agenda politik. Ketiga, *interest influencers* adalah kelompok dengan kepentingan bersama yang mencari dukungan dari pengambil keputusan. Terakhir, *mass influencers* adalah opini publik yang dibentuk oleh media massa, yang sering menjadi pertimbangan penting bagi pengambil kebijakan. Selain stabilitas politik dan sistem yang terbuka, budaya juga berperan penting dalam membentuk perilaku politik dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara (Coplin 2003).

Kedua, kondisi ekonomi dan militer suatu negara menjadi salah satu faktor negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Menurut Coplin, Jika suatu negara memiliki ekonomi yang kuat, negara tersebut dapat menggunakan sumber daya untuk berdiplomasi, berdagang, dan memberikan bantuan kepada negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga memberi negara kepercayaan diri untuk mengejar tujuan internasional yang lebih besar. Di sisi lain, kekuatan militer menentukan kemampuan negara untuk melindungi dirinya sendiri dan mempengaruhi negara lain. Singkatnya, keseimbangan antara kekuatan ekonomi dan militer sangat penting dalam menentukan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan dunia luar (Coplin 2003).

Ketiga, Coplin menjelaskan bahwa negara-negara harus mempertimbangkan posisi dan peran mereka dalam sistem internasional serta bagaimana mereka dipengaruhi dan mempengaruhi negara-negara lain. Konteks internasional disini mencakup berbagai elemen seperti hubungan diplomatik, perjanjian internasional, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara (Coplin 2003).

1.7 Argumen Sementara

Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menerima Investasi Nikel dari China Pada Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tiga variabel berdasarkan teori *decision making* oleh William D. Coplin. Variabel tersebut di antaranya berupa faktor politik domestik, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Ketiga faktor ini saling berhubungan yang pada akhirnya akan menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Pada faktor domestik, penulis menganalisis bahwa Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menerima investasi

nikel oleh China karena *interest influencer* yang di antaranya kelompok industri pertambangan dan manufaktur, bersama dengan asosiasi bisnis yang terkait memiliki kepentingan besar dalam mengembangkan sektor nikel di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperluas basis ekonomi negara dan mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi.

Dalam konteks ini, penulis tidak menggunakan variabel kapabilitas militer dikarenakan sejauh ini belum ada data spesifik yang menyebutkan bahwa Indonesia menerima investasi nikel dari China dengan harapan memperkuat militer. Fokus utama tetap pada manfaat ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia melihat investasi ini sebagai cara untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan industri nasional, yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas nasional secara keseluruhan.

Kemudian pada konteks internasional, Adanya tekanan dari Uni Eropa terkait produk CPO yang diembargo membuat Indonesia perlu mencari mitra ekonomi alternatif untuk mengimbangi potensi kerugian ekonomi dari pasar Eropa. China sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, menjadikan peluang bagi Indonesia dalam melihat China sebagai mitra dagang dan investasi. Secara ekonomi, pemerintah Indonesia membutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Investasi nikel oleh perusahaan-perusahaan China dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dasar dari pendekatan ini adalah studi literatur. Penelitian ini akan berfokus dalam menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam Menerima investasi nikel oleh China, faktor apa saja yang menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut yang ditinjau menggunakan teori *decision making*.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia dan objek yang akan diteliti adalah kebijakan dalam menerima investasi nikel dari China.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini akan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan, serta berita yang sudah terbukti kebenarannya.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini akan dilakukan dengan riset mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerima investasi nikel dari China. Selanjutnya, penelitian akan dilanjutkan menggunakan studi literatur dengan penggunaan teori *decision making* oleh William D. Coplin (2003) dan pengumpulan data sekunder yakni dari berita, laporan serta jurnal dan artikel sebagai penunjang penelitian. Setelah data lengkap, tahap selanjutnya adalah menganalisis lebih terperinci faktor terjadinya kebijakan ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan memuat empat bab sebagai berikut; Bab pertama akan memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini. Bab

ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis sementara, dan metode pengumpulan data.

Bab kedua akan membahas landasan konseptual teori Coplin terkait politik domestik. Dalam bab ini, akan diidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kebijakan Indonesia, seperti peran partai politik dan kepentingan publik. Bab ketiga akan membahas lanjutan landasan teori Coplin yakni variabel kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional.

Terakhir pada bab empat, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini, merangkum temuan-temuan utama dan implikasinya. Selain itu, penulis akan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, dengan tujuan untuk memperdalam dan mengembangkan topik yang telah dibahas, serta mengusulkan arah baru yang mungkin bermanfaat bagi penelitian di masa depan.

BAB 2

DETERMINAN POLITIK DOMESTIK

Penerimaan investasi nikel dari China oleh pemerintah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan strategis dalam negeri. Dalam kerangka Coplin, keputusan negara ditentukan oleh kombinasi antara tekanan dari luar dan kepentingan di dalam negeri, termasuk kondisi ekonomi, politik, serta persepsi risiko dan manfaat jangka panjang (Coplin 2003). Meskipun aktivitas industri nikel yang dibiayai oleh China di beberapa daerah seperti Morowali dan Halmahera menimbulkan kerusakan lingkungan, ternyata pemerintah tetap melanjutkan kerja sama tersebut dengan alasan bahwa proyek-proyek tersebut telah memenuhi standar perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan hukum nasional.

Untuk memperkuat kebijakan ini, pemerintah menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan tambang terhadap lingkungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yang mengharuskan perusahaan menyusun rencana rehabilitasi atas lahan yang telah dieksploitasi serta menyiapkan dana khusus guna menjamin pelaksanaannya. Dengan ketentuan ini, pemerintah berupaya menegaskan bahwa aktivitas pertambangan, termasuk di sektor nikel, tidak semata-mata bersifat merusak karena disertai mekanisme resmi pemulihan lingkungan guna meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan (UU No. 3 Tahun 2020; KESDM 2023).

Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan semua perusahaan tambang dan smelter termasuk yang berasal dari China untuk menyusun rencana reklamasi, menyediakan dana jaminan, dan menjalankan pengelolaan lingkungan yang

disetujui secara resmi. Melalui dokumen AMDAL dan peraturan teknis yang berlaku dalam UU Minerba, pemerintah menegaskan bahwa industri ini bisa berjalan tanpa harus merusak lingkungan secara permanen, karena ada mekanisme reklamasi yang dianggap mampu memperbaiki kondisi pasca tambang (Kesdm 2023).

Namun, kenyataan di lapangan sering kali tidak sejalan dengan dokumen formal yang dimiliki perusahaan. Laporan dari kelompok masyarakat sipil seperti Aliansi Sulawesi menunjukkan bahwa praktik industri nikel di daerah seperti Morowali dan Halmahera justru memunculkan banyak masalah lingkungan. Perusahaan-perusahaan smelter milik China, seperti Tsingshan dan Delong Group, dituding menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Bahkan, disebutkan bahwa sebagian besar perusahaan smelter tersebut abai terhadap standar perlindungan lingkungan dan sosial, serta praktik reklamasi justru dilakukan dengan cara yang membahayakan, seperti penggunaan limbah smelter sebagai timbunan reklamasi (Aliansi Sulawesi 2023).

Meskipun demikian Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang MPR RI tahun 2023, sama sekali tidak menyinggung soal kerusakan lingkungan terkait proyek hilirisasi nikel (Aliansi Sulawesi 2023). Pemerintah menganggap kerusakan yang terjadi akan diatasi oleh perusahaan dalam industri nikel karena sudah ada mekanisme reklamasi sebelum mengurus perizinan masuk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan formal sudah ada, lemahnya pengawasan di lapangan dan faktor lain seperti pengaruh dari politik domestik menjadi alasan bahwa kebijakan dalam menerima investor China tetap dijalankan.

2.1. Bureaucratic Influencers (Birokrat yang Mempengaruhi)

Pemengaruh birokrat (*bureaucratic influencers*) adalah aktor-aktor dalam struktur pemerintahan yang memiliki posisi administratif atau teknis dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri maupun dalam negeri. Mereka biasanya berasal dari lembaga-lembaga seperti kementerian, badan intelijen, atau militer, dan berperan melalui penyusunan informasi, analisis kebijakan, serta pelaksanaan keputusan. Menurut Coplin, para birokrat ini memiliki kepentingan institusional dan profesional tertentu, sehingga mereka bisa membentuk opsi-opsi kebijakan yang tersedia dan mendorong keputusan yang sesuai dengan tujuan atau kepentingan lembaga tempat mereka bekerja (Coplin 2003).

Dalam kasus ini, Birokrat berperan sebagai pelaksana administrasi dan memperkuat kerja sama yang mempertimbangkan pengambilan keputusan. kelompok tersebut bekerja di bawah arahan Presiden Jokowi yang bertindak sebagai jembatan antara pengambil keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Presiden Jokowi memegang peran utama sebagai pengarah kebijakan. Birokrat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena merekalah yang memberikan informasi penting langsung kepada pengambil keputusan untuk kemudian dipertimbangkan dalam kebijakan.

Pada bulan Juni 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan kunjungan kerja ke China. Bersama dengan ini Menteri Luar Negeri China, Wang Yi sepakat untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua negara, serta meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil dari pertemuan ini adalah Membentuk

HDCM (*High-Level Dialogue Cooperation Mechanism*), sebuah forum yang berfungsi sebagai platform bagi kedua negara untuk mengevaluasi, merancang, dan mengoordinasikan perkembangan kerja sama bilateral yang dilaksanakan berkala setiap 1 tahun sekali (Kompas 2021).

Selanjutnya pada 23 Juni 2021, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, melakukan kunjungan ke kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas aspek perizinan investasi serta pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Dalam pertemuan virtual dengan sejumlah investor dari China, termasuk Chairman Tsingshan Holding Group, Xiang Guangda, dan Chairman Delong Holdings Ltd, Ding Ligu, pemerintah menegaskan dukungannya terhadap investasi (Mercusuar 2021).

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai lembaga birokrasi yang merumuskan dan menerapkan kebijakan teknis terkait. Mengeluarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 karena ingin mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel yang sebelumnya direncanakan berlaku pada 2022 menjadi Januari 2020 (Permen ESDM 2019). Alasan utamanya adalah pemerintah ingin agar hasil tambang nikel tidak langsung diekspor mentah, tapi diolah dulu di dalam negeri supaya nilai ekonominya lebih tinggi. Selain itu, percepatan ini juga jadi bagian dari strategi pemerintahan Jokowi untuk mendorong hilirisasi industri dan menarik investasi asing, khususnya dalam pembangunan pabrik pengolahan nikel. Dengan mendukung pembangunan smelter dan industri berbasis nikel inilah

membantu pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan investor nikel termasuk China untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global (Kementerian ESDM 2019).

Dalam wawancaranya di gedung kementerian, staf khusus ESDM menjelaskan bahwa perusahaan seperti PT Vale Indonesia dan PT Aneka Tambang (Antam) sebelumnya menjadi investor utama dalam pengolahan nikel. Namun, biaya teknologi mereka lebih tinggi, sehingga sektor tambang lebih memilih bekerja sama dengan investor China yang menawarkan efisiensi dan kecepatan pembangunan konstruksi proyek. Sehingga China dipilih sebagai mitra strategis karena mampu menyediakan teknologi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan negara lain, seperti Kanada atau Jepang (Muliati 2023).

Rangkaian pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bersama kementerian terkait serta perwakilan investor dari China merupakan bagian dari upaya strategis dalam mengeksplorasi kerja sama dan menyampaikan kepentingan nasional dalam industri nikel serta kendaraan listrik. Selain itu, kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian ESDM, seperti pelarangan ekspor nikel mentah, menjadi salah satu bentuk intervensi birokrasi untuk memastikan hilirisasi industri berjalan sesuai dengan kepentingan domestik.

Aktivitas ini menghasilkan akumulasi respons dari berbagai pihak yang kemudian diteruskan kepada pengambil keputusan yakni Presiden Joko Widodo sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis. Dengan adanya mekanisme seperti HDCM yang memungkinkan kedua negara meninjau serta mengoordinasikan perkembangan kerja sama, semakin memperjelas orientasi

kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperkuat investasi China di sektor industri nikel dan kendaraan listrik.

Singkatnya, kelompok birokrat di Indonesia berhasil menjalankan perannya sesuai dengan ekspektasi dalam teori Coplin, di mana mereka berfungsi sebagai aktor yang memiliki kedekatan strategis dengan pengambil keputusan utama, yaitu Presiden Joko Widodo. Melalui berbagai kebijakan dan mekanisme kerja sama, birokrat berperan dalam membentuk arah kebijakan investasi nikel, sekaligus menjadi fasilitator utama dalam proses negosiasi dengan pihak asing, khususnya China.

Namun, terlepas dari perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), terdapat banyak dugaan yang mengarah pada adanya politik kepentingan yang melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam kerja sama investasi nikel. Hal ini diperkuat oleh berbagai laporan yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya memiliki kepentingan bisnis dalam industri pertambangan dan hilirisasi nikel. Dugaan konflik kepentingan semakin menguat seiring dengan dominasi investasi China dalam sektor ini, yang dinilai menguntungkan pihak-pihak tertentu dibandingkan dengan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Luhut memiliki pandangan bahwa hubungan yang erat dengan China sangat penting bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, China adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan transformasi sektor industri Indonesia. Pada kesempatan lain, Luhut juga menyatakan bahwa hubungan China Indonesia dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung

sektor industri strategis seperti baterai listrik (Tempo 2023). Namun beberapa pihak berpendapat bahwa kepentingan Luhut yang kuat di China memiliki hubungan dengan bisnis pribadinya yang melibatkan proyek-proyek dengan investor China.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Luhut mempunyai induk perusahaan bernama Toba Sejahtra Group yang terbagi menjadi 16 anak perusahaan dengan masing-masing bergerak dalam berbagai sektor seperti tambang batu bara, energi, dan infrastruktur. Beberapa perusahaan dari grup ini memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asal China, terutama dalam bidang tambang dan energi terbarukan. Contohnya, PT Toba Bara Sejahtra dan anak perusahaannya terlibat dalam kerja sama dengan perusahaan China dalam pengolahan batu bara dan proyek energi terbarukan. Selain itu, PT Kartanegara Energi Perkasa dan PT Pusaka Jaya Palu Power juga memiliki keterlibatan dengan China dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sementara itu, PT Mineral Langgeng berfokus pada proyek hilirisasi nikel dan produksi baterai *lithium ferro phosphate* (LFP) di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah, yang melibatkan perusahaan-perusahaan China dalam riset dan pengembangannya (Jatam 2018).

Spekulasi ini semakin berkembang karena Luhut memiliki latar belakang yang aktif dalam berbagai kerja sama yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan China sebelum dan selama periode ini, yang memperkuat dugaan adanya politik kepentingan di balik dukungan kebijakan luar negeri terkait investasi nikel Indonesia China. Coplin menyatakan bahwa hubungan yang kuat antara birokrat dan pemimpin memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan dengan

menyampaikan argumen yang sering kali memperkuat kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Luhut berperan sebagai jembatan antara pemerintah Indonesia dan para investor China, memunculkan dugaan untuk memanfaatkan koneksi, strategi, dan narasi yang telah dibangunnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi asing.

2.2. Partisan Influencers (Partai yang Mempengaruhi)

Partisan influencer berperan dalam mengubah tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politik yang disampaikan kepada pengambil kebijakan. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi warga dan proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan jaringan dan pengaruhnya. Melalui aktivitas mereka, *partisan influencer* membantu memastikan bahwa isu-isu yang diangkat masyarakat mendapat perhatian dari pemangku kebijakan. Dengan mempengaruhi opini publik dan mendorong komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, mereka membantu agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Coplin 2003).

Fraksi Partai Demokrat memandang investasi nikel dari China dengan skeptis, terutama karena dominasi perusahaan asing yang dinilai terlalu besar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kritik Demokrat terpusat pada fakta bahwa banyak tambang nikel dikuasai oleh perusahaan China, seperti yang dilaporkan. Mereka mengkhawatirkan bahwa ketimpangan ini membuat Indonesia kehilangan kontrol atas kekayaan alamnya. Selain itu, Demokrat juga mempertanyakan manfaat investasi ini bagi masyarakat Indonesia, mengingat banyaknya keluhan mengenai tenaga kerja asing yang dominan di sektor smelter (Pahlevi 2022).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap kritis terhadap investasi asing, termasuk yang berasal dari China. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa ketergantungan pada investasi luar negeri dapat mengancam kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Kritik PKS terutama mengarah pada hilirisasi nikel, yang mereka anggap lebih menguntungkan China daripada rakyat Indonesia. Kehadiran pabrik smelter milik China serta dominasi tenaga kerja asing menjadi sorotan utama. PKS menegaskan pentingnya kebijakan yang memastikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, bukan hanya untuk keuntungan investor asing (PKS 2022).

Adapun partai Gerindra, melalui perwakilannya di Komisi VI DPR, secara vokal mengkritik pengelolaan smelter nikel milik China. Kritik mereka berfokus pada harga pembelian sumber daya yang dianggap terlalu murah dan tidak memberikan keuntungan maksimal bagi Indonesia. Andre Rosiade bahkan menyebut kebijakan terkait investasi ini sebagai “bungkus kacang goreng,” yang berarti tidak memberikan manfaat substansial. Gerindra juga menyoroti perlunya kebijakan yang melindungi kepentingan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun kedaulatan, dengan memastikan investor asing terutama China tidak merugikan masyarakat lokal (Tempo 2020).

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyambut baik investasi China di sektor nikel. Puan Maharani memuji posisi China sebagai salah satu investasi luar terbesar di Indonesia, dimana kontribusi langsung sebesar USD 3,2 miliar. Menurut PDIP, investasi ini mendukung agenda industrialisasi Indonesia, terutama melalui pengembangan smelter yang mampu meningkatkan nilai tambah nikel. Namun, mereka juga menekankan pentingnya kehati-hatian agar investasi

ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia tanpa mengorbankan kedaulatan nasional (Suara Bogor 2022).

Selain itu Golkar memandang kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sebagai langkah strategis yang telah membawa keuntungan besar bagi Indonesia. Menurut Bambang Soesatyo, kebijakan ini berhasil mendorong hilirisasi industri nikel yang akhirnya menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Golkar mendukung keberadaan pabrik pengolahan nikel milik investor asing seperti China karena dinilai mampu memberikan manfaat nyata, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah seperti Papua. Sikap Golkar menunjukkan optimisme terhadap kolaborasi investasi asing dalam mendukung perekonomian nasional (Tempo 2022).

Adapun menurut Zulkifli Hasan sebagai ketua Partai Amanat Nasional (PAN), China telah menjadi mitra dagang terbesar Sejak 2009. Di antara mitra dialog ASEAN, China adalah sumber investasi asing terbesar keempat. Karena peran penting ASEAN dan China di kawasan, kerja sama antara mereka harus ditingkatkan. PAN menanggapi kebijakan ini dengan positif dan penekanan terhadap pentingnya investasi asing untuk pengembangan industri nikel (Kurniawan 2020).

Pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, partai-partai pendukung pemerintah menguasai sekitar 61,6% kursi di DPR, sementara partai oposisi hanya memiliki 38,4% kursi (Kompas 2019). Artinya suara partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, dan PAN masih dominan di parlemen. Ini terjadi meskipun kritik dari partai oposisi seperti Demokrat, PKS, dan Gerindra cukup vokal dalam menyuarakan kekhawatiran terkait dominasi perusahaan asing

khususnya China, dalam investasi nikel. Ketiga partai ini tidak hanya memiliki posisi yang kuat dalam koalisi pemerintahan, tetapi mereka juga sering mendukung kebijakan investasi yang berfokus pada keuntungan ekonomi seperti peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan dominasi suara mereka di parlemen, kebijakan pro-investasi yang diusung pemerintah terus berlanjut, dan oposisi tidak dapat mengubah kebijakan yang sudah ada.

Dalam pengambilan keputusan, sikap partai-partai ini mencerminkan prioritas ideologi dan basis konstituennya. Partai pendukung pemerintah (PDIP, Golkar dan PAN) cenderung menekankan manfaat ekonomi dan stabilitas investasi, sementara partai oposisi (Demokrat, PKS, Gerindra) lebih kritis terhadap dampak sosial, lingkungan, dan kedaulatan. Pengaruh partisan ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap kebijakan investasi dipengaruhi oleh tujuan politik masing-masing partai, dengan fokus pada kebutuhan pemilih mereka serta strategi untuk mempertahankan atau memperluas basis dukungan (Coplin 2003).

Menurut pandangan Coplin, partai-partai di negara demokratis yang stabil cenderung lebih fokus pada isu-isu domestik dibandingkan kebijakan luar negeri. Hal ini terlihat dalam konteks Indonesia, di mana keputusan terkait investasi nikel dari China lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden dan kementerian terkait yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kendali atas kebijakan luar negeri termasuk investasi asing, umumnya berada di tangan eksekutif, sementara pengaruh partai politik terutama di parlemen relatif terbatas. Kritik yang disampaikan oleh partai oposisi sering kali mencerminkan pandangan ideologis atau strategi untuk menarik simpati publik, namun jarang

memiliki kekuatan nyata untuk mengubah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Coplin 2023).

2.3. Interest Influencers (Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest influencer merupakan aktor kolektif yang memiliki kepentingan bersama, seperti di bidang ekonomi, etnis, agama, atau pemberdayaan. Meskipun pengaruh mereka tidak secara langsung mempengaruhi tindakan politik luar negeri, peran mereka di tingkat domestik, seperti memberikan dukungan finansial dan mengangkat isu-isu tertentu, menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok ini bisa berasal dari kalangan pengusaha, asosiasi industri, *think tank* dan bahkan masyarakat yang memiliki kepentingan lain. Dalam konteks kebijakan investasi nikel di Indonesia, *interest influencer* disini berupa perusahaan besar yang membawa modal, teknologi, dan strategi untuk mendukung agenda pemerintah, sekaligus mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut.

Salah satu contoh kelompok kepentingan yang sangat berpengaruh adalah Tsingshan Holding Group yang merupakan perusahaan penghasil baja karat terbesar di dunia yang berasal dari China. Dalam proyek hilirisasi di Indonesia, perusahaan ini memegang andil yang cukup besar terutama di wilayah industri Morowali, Sulawesi Tengah. Tsingshan bisa mendapatkan akses dalam mengelola cadangan nikel indonesia yang melimpah dengan menginvestasikan biaya miliaran dolar untuk membangun pabrik smelter dan pendukung lainnya. Hal ini bisa dilihat ketika Tsingshan mampu melobi pemerintah indonesia untuk membangun hubungan yang strategis untuk kepentingan ekonomi dan teknologi sehingga sejalan dengan visi hilirisasi pemerintah.

Tsingshan Group bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2020 untuk membangun pabrik smelter nikel berbasis teknologi *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) di Morowali dan Halmahera. Negosiasi terkait pembangunan smelter HPAL ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas pengolahan nikel domestik, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk berbasis nikel, terutama untuk baterai kendaraan listrik. Dengan teknologi HPAL, proses pengolahan nikel dapat dilakukan dengan efisiensi yang lebih tinggi, menghasilkan produk yang lebih bernilai (Wicaksono and Bhawono 2020).

Adapun Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa industri nikel di Indonesia berkembang dengan cara yang menguntungkan bagi para penambang lokal. Dengan mendorong kebijakan larangan ekspor bijih mentah dan pembangunan smelter, APNI berupaya menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan bagi para anggotanya. Mereka juga berusaha memastikan bahwa harga jual nikel tetap kompetitif di pasar global serta menghindari dominasi harga oleh investor asing yang memiliki kendali atas fasilitas pengolahan (Apni 2019).

Sejak 2019, APNI aktif mengadvokasi larangan ekspor bijih nikel dan mendukung pembangunan smelter dengan menggandeng investor asing, termasuk dari China. Hal ini disampaikan oleh ketua APNI yang meyakini bahwa investasi dari China dapat membawa teknologi canggih dan modal besar yang diperlukan untuk mengembangkan industri nikel di Indonesia. Melalui berbagai upaya lobi dan advokasi, APNI berupaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal ini

menunjukkan perannya sebagai pihak yang berpengaruh dalam kerja sama industri nikel dengan China. Dengan menggandeng investor China, APNI mendapatkan jaminan pasar dan modal yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan industri nikel Indonesia (Apni 2019).

Keberadaan Tsingshan Holding Group, dan APNI dalam kebijakan investasi nikel Indonesia menunjukkan bagaimana *interest influencer* bekerja sesuai dengan konsep Coplin. Mereka tidak hanya berperan sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga aktif membentuk kebijakan melalui berbagai mekanisme, seperti investasi langsung, advokasi, partisipasi dalam diskusi kebijakan, serta memberikan rekomendasi berbasis data. Dinamika ini menegaskan bahwa keputusan pemerintah bukanlah hasil dari proses yang netral, melainkan merupakan arena negosiasi di mana aktor-aktor berkepentingan bersaing untuk mempengaruhi arah kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka.

2.4. Mass Influencers (Opini Publik)

Mass Influencers dapat dilihat dari bagaimana opini berkembang di masyarakat. Menurut Coplin media dan pemengaruh lainnya sering membingkai isu-isu tertentu untuk membentuk cara pandang masyarakat dan pemerintah. Mereka terdiri dari berbagai kelompok, termasuk pemerintah, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), serta investor dan pelaku industri. Dalam konteks kebijakan hilirisasi nikel, masing-masing aktor memiliki kepentingan dan narasi yang berbeda.

Coplin menyatakan bahwa opini publik berpengaruh terhadap suatu negara dalam mempertimbangkan keputusan. Namun tidak sepenuhnya pengambil

keputusan dikontrol oleh opini publik. Opini publik disini digunakan seolah menjadi alat pengambil keputusan untuk merasionalkan tindakan politik luar negeri bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri. Contoh seperti pada penelitian kali ini, meskipun ada tekanan terkait tidak setujuan atas investasi nikel China, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan. Karena sebenarnya para pengambil keputusan sudah merasionalkan alasan positif dengan menggiring opini positif melalui media nasional dan utama (Coplin 2003). Berikut arus media nasional dan utama.

Tabel 2. Jumlah Berita dari Media Arus Utama dan Investigatif Mengenai Tambang dan Smelter Nikel

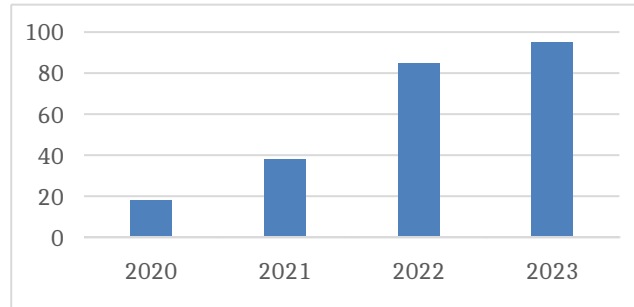
Sumber Pemberitaan	Jumlah Berita
Detik.com	58
Suara.com	32
Kompas.com	27
Pikiran Rakyat	25
Tribunnews.com	26
Berita Investigatif (Mongabay, Tempo, Tirta.id, dan Project Multatuli)	21
Total	189

Sumber: Djamhari et al. (2024, 22)

Media arus utama seperti Kompas dan Detik banyak menyoroti peningkatan investasi asing, terutama dari China, yang diklaim memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, media investigatif seperti Tempo dan Mongabay lebih fokus membahas dampak negatif dari eksploitasi nikel, seperti pencemaran lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat adat. Sejak larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 1 Januari 2020, pemberitaan tentang pertambangan dan smelter nikel mengalami lonjakan signifikan. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa tren pemberitaan tentang nikel mengalami kenaikan

tajam setelah adanya kebijakan larangan ekspor, hingga puncak perhatian media terjadi pada 31 Maret 2023 (Djamhari et al 2024).

Grafik 1. Pergerakan pemberitaan industri nikel 2020-2023



Sumber: Djamhari et al. (2024, 25)

Dari pergerakan pemberitaan industri nikel, di berbagai media utama Presiden RI menjadi aktor yang paling sering menyinggung tambang dan smelter nikel dalam berbagai pernyataannya, terutama terkait kontribusi terhadap penerimaan negara, hilirisasi industri, pengembangan baterai kendaraan listrik, serta tambang ilegal. Namun, perbedaan pendapat muncul di antara aktor lain, seperti POLRI dan DPR. Sebagian pihak di POLRI menyoroti maraknya praktik tambang dan smelter ilegal, sementara sebagian lainnya tidak sepakat dengan klaim tersebut. Di sisi lain, DPR juga memiliki pandangan yang beragam mengenai penerimaan negara dari sektor nikel. Beberapa anggota DPR menilai bahwa industri ini memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara, sementara yang lain meragukan manfaatnya karena adanya kasus-kasus tertentu.

Tabel 3. Perbedaan Opini Aktor Terhadap Smelter Nikel

Aktor	Kategori	Dampak Positif yang Disoroti	Dampak Negatif yang Disoroti
Pemerintah Pusat	Presiden, Kementerian Investasi,	<ul style="list-style-type: none"> Hilirisasi meningkatkan nilai tambah 	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tambang ilegal menjadi perhatian

	Kementerian ESDM	<p>ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja. • Mendukung pengembangan baterai kendaraan listrik. • Kontribusi besar terhadap penerimaan negara. 	<p>utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan terhadap investasi asing (terutama dari China).
Pemerintah Daerah	(Pemda Sulawesi Selatan, Konawe, Buton Utara, dll.)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penerimaan daerah dan infrastruktur lokal. • Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak negatif terhadap lingkungan (deforestasi dan pencemaran air). • Distribusi manfaat yang tidak merata (masyarakat lokal tidak selalu mendapat keuntungan).
Aparat Penegak Hukum	POLRI, Yudikatif	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya penegakan hukum terhadap tambang ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan pandangan dalam internal POLRI mengenai keberadaan tambang ilegal.
DPR	(Sebagian Anggota DPR Mendukung, Sebagian Menolak)	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi besar bagi ekspor produk bernilai tambah. • Hilirisasi mendukung perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada ketidaksepahaman soal kontribusi terhadap penerimaan negara. • Beberapa menilai dampak terhadap lingkungan dan

		nasional.	kesejahteraan masyarakat kurang diperhatikan.
Organisasi Masyarakat Sipil	(WALHI, JATAM, Greenpeace, dll.)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendesak regulasi lingkungan yang lebih ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan lingkungan akibat ekspansi tambang. • Ancaman terhadap hak buruh dan masyarakat adat. • Ketimpangan ekonomi, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh investor besar.

Sumber: Djamhari et al. (2024)

Di sini terlihat pemerintah berupaya menggiring opini publik dengan menekankan manfaat ekonomi dari hilirisasi, seperti peningkatan ekspor produk bernilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil lebih banyak mengkritisi dampak lingkungan dan sosial akibat ekspansi industri nikel China yang semakin masif. Kehadiran media juga sangat mempengaruhi dikursus ini, dengan media nasional cenderung mendukung kebijakan hilirisasi, sedangkan media investigatif lebih menyoroti dampak negatifnya terhadap lingkungan dan hak-hak pekerja tambang.

Dorongan kuat dari media massa dan berbagai pemengaruh opini publik punya andil besar dalam keputusan Indonesia tetap menerima investasi nikel dari China. Pemberitaan yang gencar tentang manfaat hilirisasi seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, dan lapangan kerja membentuk persepsi publik bahwa kebijakan ini adalah langkah strategis yang harus diambil. Sementara itu,

kritik dari media investigatif dan kelompok masyarakat sipil yang menyoroti dampak lingkungan dan sosial tak cukup mampu membalik arus opini dominan.

Pada akhirnya, tekanan opini publik yang lebih besar baik dari media arus utama, pemangku kepentingan ekonomi, maupun ekspektasi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah untuk terus melanjutkan kebijakan investasi nikel dari China. Meskipun kritik terhadap dampak lingkungan dan sosial tetap ada, pemerintah lebih mempertimbangkan manfaat ekonomi yang telah dikonstruksi sebagai kepentingan nasional.

BAB 3
DETERMINAN KONDISI EKONOMI DAN KONTEKS
INTERNASIONAL

3.1. Subdeterminan Ekonomi

Menurut Coplin, determinan ekonomi mengacu pada elemen internal yang berasal dari struktur dan kebutuhan ekonomi domestik yang memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan strategis ekonomi, negara membuka peluang investasi asing. Ekonomi domestik menjadi salah satu determinan penting dalam pengambilan keputusan karena kebijakan yang diambil pemerintah sering kali bertujuan untuk menjaga stabilitas internal, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pembangunan nasional (Coplin 2003)

Performa perekonomian Indonesia dapat dilihat melalui indikator *Gross Domestic Product (GDP)*, *Gross National Income (GNI)*, dan *Foreign Direct Investment (FDI)*. GDP mencerminkan total nilai produksi barang dan jasa dalam negeri dalam satu tahun, sementara GNI mencerminkan total pendapatan yang diperoleh warga negara Indonesia, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, FDI menunjukkan aliran investasi asing yang masuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, GDP dan GNI Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, meskipun mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, FDI menjadi faktor yang cukup signifikan dalam pembangunan ekonomi, dengan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur.

Tabel 4. Performa GDP, GNI & FDI Indonesia 2018-2022

Tahun	GDP (Rp Triliun)	GNI (Rp Triliun)	FDI (RP Triliun)
2019	15.833	16.134	341
2020	15.400	15.700	270
2021	17.350	17.630	456
2022	19.250	19.570	665

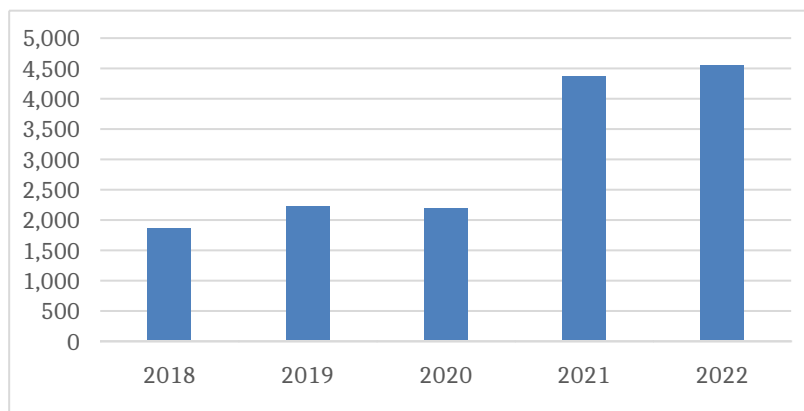
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); The World Bank (2022)

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa FDI memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, FDI kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022, hal ini mencerminkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing. Investasi asing tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap sektor infrastruktur, manufaktur, dan jasa yang menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Selain itu regulasi pemerintah yang semakin mendukung investasi asing, seperti kemudahan perizinan dan insentif pajak, menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada modal asing untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi (Isnainul et al. 2020).

Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi nikel sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan hasil tambang secara maksimal dan menekan ketergantungan pada penjualan bahan mentah ke luar negeri. Hal ini dibuktikan sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel mentah, aliran investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2022, realisasi investasi asing tercatat meningkat sebesar 47 persen, dengan sektor-sektor yang berkaitan dengan hilirisasi sebagai pendorong utama. Hampir setengah dari pertumbuhan investasi tersebut berasal dari modal yang masuk dari China dan Hong Kong (Internasional Monetary Fund 2023).

Perusahaan-perusahaan China mendominasi pendanaan dan pembangunan smelter di berbagai wilayah di Indonesia, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022, investasi China di sektor nikel Indonesia mencapai triliunan rupiah, menjadikannya investor terbesar dalam industri ini. Peningkatan investasi ini juga berdampak pada infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik di sekitar kawasan industri nikel (Dinata et al. 2020).

Grafik 2. Realisasi Investasi China ke Indonesia dalam US\$



Sumber: CEIC Data (2023)

Menurut laporan CEIC Data tahun 2023, investasi China di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan informasi dari Griffith University Australia, beberapa sektor yang menjadi fokus utama investasi China di Indonesia mencakup infrastruktur, teknologi, logam, dan pertambangan. Secara lebih luas di kawasan Asia, keterlibatan China dalam sektor logam dan pertambangan mencapai USD 5,3 miliar pada tahun 2022, dengan Indonesia sebagai negara tujuan utama di Asia-Pasifik. Dari berbagai sektor yang mendapat investasi tersebut, industri nikel menjadi bagian yang paling dominan, mengingat

perannya yang penting dalam rantai pasok global, khususnya untuk produksi baterai kendaraan listrik (CEIC 2023).

Selain itu, menurut laporan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pendapatan negara mengalami kenaikan dari 17 Triliun sejak 2020 meningkat menjadi 326 Triliun saat 2021. Artinya terjadi sebesar 19 kali peningkatan pendapatan negara dan bahkan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia (Rosada et al. 2023).

Dengan demikian, hal ini selaras dengan teori Coplin yang menyatakan bahwa salah satu alasan negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya tergantung dari kemampuan dan arah ekonomi ke depannya. Dalam hal ini, Indonesia memutuskan kebijakan untuk menerima China sebagai investor dengan alasan untuk memperkuat kestabilan ekonomi dan China dirasa mampu mewujudkannya melalui investasi yang besar.

3.2. Subdeterminan Konteks Internasional

Konteks internasional adalah lingkungan global yang mempengaruhi keputusan politik suatu negara, terutama dalam kebijakan luar negeri. Dari sisi geopolitik, lokasi strategis, sumber daya alam, dan konflik regional juga berperan besar dalam menentukan langkah suatu negara. Menurut Coplin (2003), negara tidak bisa bertindak sendiri tanpa mempertimbangkan tekanan dan peluang dari situasi global yang lebih luas. Ada 3 elemen/ faktor penting dalam konteks internasional yakni geografis, ekonomi dan politik.

3.2.1. Faktor Geopolitik

Menurut Coplin, geopolitik merujuk pada pengaruh letak geografis, posisi strategis suatu negara, serta dinamika kekuatan internasional dalam menentukan keputusan politik luar negeri. Geopolitik tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah atau kondisi geografis saja, tetapi juga mencakup bagaimana suatu negara merespons tekanan dan peluang yang muncul dari persaingan global (Coplin 2003). Dalam konteks ini, keputusan Indonesia menerima investasi nikel dari China dapat dipahami sebagai bagian dari manuver geopolitik yang mempertimbangkan posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta kepentingan strategis global atas sumber daya nikel.

Keberadaan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menjadikannya bagian penting dalam rantai pasok global yang terkoneksi dengan China. Posisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan bagian selatan laut China selatan semakin memperkuat daya tarik investasi, karena kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan dan industri maritim dunia. Faktor ini sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di sektor pertambangan, mengingat efisiensi rantai pasok merupakan salah satu kunci utama dalam kompetisi global (Widodo 2022).

Letak Indonesia yang strategis di antara dua samudra besar yakni Hindia dan Pasifik serta berada di jalur pelayaran internasional menjadikannya bagian penting dalam strategi geopolitik China. Dalam konteks *Belt and Road Initiative* (BRI), China tidak hanya berupaya mengamankan pasokan nikel, tetapi juga memperkuat kehadiran ekonominya di wilayah Indo Pasifik yang diperebutkan oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Dengan memiliki posisi dekat Selat

Malaka dan Laut China Selatan, Indonesia menjadi mitra penting dalam pengaruh kawasan, sekaligus jalur kunci dalam rantai pasok bahan baku industri energi bersih global. Maka investasi China di sektor nikel Indonesia bukan hanya soal efisiensi logistik, tetapi bagian dari strategi global memperkuat posisi ekonomi dan politiknya di kawasan Indo Pasifik (Zhang et al. 2023).

Namun, keterlibatan China yang sangat dominan dalam sektor strategis seperti industri nikel juga menghadirkan risiko tertentu bagi kedaulatan ekonomi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu aktor global dapat membatasi ruang gerak Indonesia dalam merumuskan kebijakan secara independen, terutama jika muncul konflik kepentingan antara negara investor dan agenda nasional (Riedho 2024). Oleh karena itu, secara geopolitik Indonesia perlu menyeimbangkan kerja sama luar negeri agar tidak terjebak dalam blok pengaruh tertentu yang bisa mengurangi fleksibilitasnya di masa depan.

3.2.2. Faktor Ekonomi

Menurut Coplin, faktor ekonomi dalam konteks determinan internasional mengacu pada bagaimana kondisi ekonomi global, kebijakan perdagangan internasional, arus investasi asing, dan ketergantungan suatu negara terhadap pasar luar negeri memengaruhi keputusan politik luar negeri negara tersebut. Coplin menekankan bahwa negara tidak dapat membuat keputusan secara independen karena interdependensi ekonomi global menjamin stabilitas nilai tukar, harga komoditas dunia, dan harga komoditas lainnya (Coplin 2003). Misalnya negara yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam, seperti nikel Indonesia,

akan mempertimbangkan reaksi investor asing dan negara mitra dagang utama saat membuat kebijakan investasi mereka.

Salah satu contoh nyatanya adalah saat terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China sejak 2019. Konflik tersebut membuat perdagangan global tidak stabil dan berdampak pada penurunan permintaan ekspor dari negara-negara Barat yang di mana selama ini menjadi mitra dagang utama Indonesia. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memandang China sebagai alternatif yang lebih stabil untuk menjaga keberlangsungan ekonomi nasional (Internasional Monetary Fund 2022). Langkah ini terlihat di mana kerja sama ekonomi Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia.

Di sisi lain, China juga mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pasar Amerika Serikat yakni dengan memperkuat hubungan ekonomi ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Salah satu caranya adalah lewat proyek *Belt and Road Initiative* yang mendorong investasi di berbagai sektor, salah satunya sektor nikel Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena nikel sangat dibutuhkan untuk produksi baterai kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat di negara China. Data dari *American Enterprise Institute* mencatat bahwa nilai investasi China di Indonesia naik dari USD 2,4 miliar di tahun 2020 menjadi USD 3,41 miliar pada 2023 pada sektor nikel (Scissors 2023). Ini memperlihatkan bahwa kebijakan Indonesia dalam menerima investasi dari China juga dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi global, bukan hanya karena faktor dalam negeri.

Selain itu, meningkatnya permintaan global terhadap nikel juga jadi alasan kenapa Indonesia cenderung membuka diri terhadap investasi China. Indonesia

punya cadangan nikel yang besar, sedangkan China punya kebutuhan tinggi untuk bahan baku tersebut karena menguasai produksi baterai kendaraan listrik di dunia. Dengan cadangan devisa China yang sangat besar, mereka punya kekuatan modal untuk berinvestasi di Indonesia. Tercatat oleh Bank Dunia pada tahun 2021, nilai cadangan devisa China mencapai 3,2 triliun USD. Sejalan dengan itu, *International Energy Agency* (IEA) mengindikasikan bahwa lebih dari 60% pasar baterai kendaraan listrik global berada di bawah kendali China (International Energy Agency 2022). Karena itu kerja sama ekonomi ini menguntungkan kedua belah pihak dan memperlihatkan adanya ketergantungan suatu negara terhadap pasar luar negeri yang saling melengkapi.

3.2.3. Faktor Politik

Keputusan Indonesia untuk menerima investasi nikel dari China tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik domestik dan internasional. Salah satu faktor utama adalah hubungan strategis antara Indonesia dan China yang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah menjalin kerja sama ekonomi yang lebih intensif dengan China melalui inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) yang menawarkan peluang investasi besar, termasuk di sektor pertambangan dan infrastruktur (Li & Zhang 2021). Dalam konteks ini, investasi nikel dari China tidak hanya dipandang sebagai peluang ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan salah satu mitra dagang terbesar dunia (Kementerian Luar Negeri RI 2022).

Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi pada peningkatan ekonomi turut mendorong penerimaan investasi dari China. Pemerintah Indonesia menekankan kebijakan luar negeri bebas aktif, namun dalam

praktiknya memang lebih condong pada kerja sama yang menguntungkan dari sisi ekonomi (Laksmiana 2022). Dalam hal ini, investasi nikel dari China sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam (Peraturan Presiden No. 55/2019). Pemerintah melihat investasi ini sebagai cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur industri dan menciptakan lapangan kerja, meskipun di sisi lain memicu kritik dari berbagai pihak terkait dampak lingkungan dan dominasi investor asing (Kompas 2023).

Namun Pada 2019 setelah dikeluarkannya Permen ESDM terkait hilirisasi nikel, memicu perselisihan dengan Uni Eropa yang mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa menilai bahwa larangan ekspor nikel Indonesia menghambat akses mereka terhadap bahan baku strategis dan bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Sebagai importir utama nikel sebelum kebijakan ini diberlakukan, Uni Eropa merasa dirugikan oleh pembatasan tersebut dan mengklaim bahwa Indonesia melanggar aturan WTO. Dalam persidangan, WTO akhirnya memutuskan bahwa kebijakan Indonesia tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional, sehingga Indonesia dinyatakan kalah dalam sengketa ini (Arya 2022).

Meskipun kalah dalam gugatan WTO, Indonesia tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan hilirisasi nikel. Dengan ekspor nikel mentah ke Uni Eropa yang terhenti, artinya Indonesia perlu mencari pasar baru yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Di sini Indonesia melihat China sebagai mitra yang potensial dalam pengembangan pasar dan teknologi nikelnya. China tidak hanya berperan sebagai pembeli utama nikel olahan Indonesia, tetapi juga sebagai investor besar dalam pembangunan fasilitas pemurnian dan produksi baterai di Indonesia.

Ketergantungan ini mempercepat implementasi hilirisasi sekaligus mengamankan pasar bagi produk nikel Indonesia, mengingat China merupakan pasar terbesar untuk kendaraan listrik di dunia (Arya 2022).

Dalam hal ini, menerima investasi dari China menjadi pilihan strategis bagi Indonesia karena memberikan keuntungan ekonomi langsung tanpa harus terlalu bergantung pada negara Barat yang cenderung memiliki regulasi investasi yang lebih ketat (Bappenas 2023). Namun di saat yang sama, Indonesia tetap harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat, terutama dalam konteks kebijakan lingkungan dan standar transparansi investasi (Widodo 2023).

Seperti yang telah dijelaskan dalam ketiga faktor konteks internasional di atas, keputusan Indonesia untuk tetap menerima investasi nikel dari China mencerminkan pandangan Coplin bahwa keputusan politik luar negeri tidak diambil dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh tekanan dan peluang global. Letak strategis Indonesia, ketergantungan ekonomi terhadap China, serta dinamika politik internasional seperti kerja sama BRI dan gugatan WTO, semuanya menjadi faktor yang membentuk kalkulasi rasional pemerintah dalam memilih mitra investasi. Dalam kerangka Coplin, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memandang lingkungan internasional sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri demi mencapai kepentingan nasionalnya, meskipun disertai konsekuensi dan kritik dari aktor lain.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai negara dengan penghasil nikel terbanyak di dunia, Indonesia memanfaatkan hal ini dengan pelarangan nikel mentah menjadi nikel yang telah di olah atau disebut dengan hilirisasi. Setelah hilirisasi ini di terapkan pada tahun 2020, peningkatan ekspor nikel pun berkembang pesat dengan mayoritas 90% investasi asing berasal dari China. Namun dalam implementasinya, ternyata investasi ini tidak berjalan sesuai dengan prinsip berkelanjutan pemerintah Indonesia dan justru banyak menimbulkan penolakan dari berbagai pihak terkait permasalahan lingkungannya.

Melihat hal ini, tentunya menjadi tanda tanya terkait alasan mengapa pemerintah Indonesia tetap melanjutkan kebijakan ini meskipun keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi pengambilan keputusan dibantu dengan teori *decision-making* yang dikembangkan oleh William D. Coplin. Teori ini menjelaskan tiga determinan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh suatu negara, yaitu determinan politik dalam negeri, determinan konteks internasional, dan determinan kondisi militer & ekonomi.

Dalam kondisi dalam negeri, alasan pemerintah tetap menerima China dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa kerusakan yang terjadi akan diatasi oleh perusahaan dalam industri nikel, karena sudah ada mekanisme reklamasi sebelum mengurus perizinan masuk. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa dalam

determinan politik dalam negeri, keberlanjutan kebijakan penerimaan investasi nikel dari China sangat dipengaruhi oleh dominasi kekuatan politik pendukung pemerintah di parlemen, peran aktif birokrasi, serta dukungan dari kelompok kepentingan dan pemengaruh massa. Partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, dan PAN yang tergabung dalam koalisi pemerintahan menguasai lebih dari 60% kursi di DPR, sehingga memudahkan proses legislasi dan pengesahan kebijakan pro investasi tanpa hambatan berarti dari oposisi. Di sisi lain, birokrasi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara aktif memfasilitasi kerja sama ekonomi dengan China, termasuk memimpin proses negosiasi dan pengawalan proyek investasi proyek strategis. Tidak kalah penting, kelompok kepentingan seperti asosiasi industri dan pengusaha di sektor pertambangan, serta pemengaruh massa seperti tokoh masyarakat dan akademisi pro hilirisasi, turut menciptakan opini publik yang mendukung keberlanjutan investasi ini.

Dalam penelitian ini, mengapa determinan militer tidak digunakan karena menurut Coplin, faktor militer berperan dalam analisis kebijakan luar negeri ketika suatu negara menghadapi ancaman keamanan atau mempertimbangkan kapabilitas pertahanan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam konteks kebijakan investasi nikel Indonesia, tidak terdapat indikasi bahwa pertimbangan militer menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pemerintah. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak digunakan determinan militer.

Dalam determinan ekonomi, Keputusan pemerintah untuk tetap menerima investasi China di sektor nikel didorong oleh kebutuhan mendesak Indonesia akan modal, teknologi, dan mitra strategis dalam mendorong hilirisasi. Sejak larangan

ekspor bijih nikel dikeluarkan 2019, Indonesia menargetkan peningkatan nilai tambah dari sektor pertambangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, China muncul sebagai investor yang paling siap secara finansial dan teknologi. Selain itu, ketergantungan Indonesia terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) juga memperkuat posisi China sebagai mitra dominan. Di tengah tekanan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan keterbatasan pembiayaan dalam negeri, investasi China dipandang sebagai solusi cepat untuk menstimulasi ekspor, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan infrastruktur industri nikel.

Sementara itu, dalam determinan konteks internasional, kebijakan pemerintah tidak lepas dari dinamika global dan arah hubungan luar negeri yang menguntungkan kedua belah pihak. Kondisi geopolitik Indonesia di kawasan Indo Pasifik menjadikannya bagian penting dalam rantai pasok global yang terkoneksi langsung dengan China, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang mendorong melemahnya perekonomian global. Ketergantungan masing masing negara terhadap pasar internasional menuntut untuk kerjasama lebih lanjut. Di sisi lain, Indonesia memanfaatkan peluang ini untuk mempercepat hilirisasi melalui kerja sama dengan China yang menawarkan modal besar, transfer teknologi, dan komitmen investasi jangka panjang. Terlebih lagi, setelah Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel, pemerintah justru semakin memperkuat hubungan dengan China sebagai mitra utama yang tidak menentang kebijakan tersebut.

Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap menerima investasi nikel dari China dapat dianalisis melalui

tiga determinan utama dalam teori *decision-making* Coplin, yaitu determinan politik dalam negeri, konteks internasional, dan kondisi ekonomi. Ketiga determinan ini saling berhubungan, di mana masing-masing sub determinan dapat saling memperkuat dalam menjelaskan alasan kebijakan tersebut dipertahankan. Keterkaitan antara faktor politik domestik seperti dominasi koalisi pemerintah dan peran birokrasi, dinamika hubungan internasional dengan negara mitra seperti China dan Uni Eropa, serta tekanan ekonomi pasca pandemi menjadikan keputusan ini sebagai bentuk respons strategis pemerintah dalam menghadapi kebutuhan pembangunan industri nasional yang kompleks. Keputusan untuk terus membuka ruang investasi bagi China dalam sektor nikel mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, merespons tantangan global, dan memajukan agenda hilirisasi melalui kerja sama internasional yang dianggap paling menguntungkan.

4.2 Rekomendasi

Untuk kebijakan pemerintah, diperlukan pengawasan ketat terhadap perusahaan pertambangan dari China, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi investasi agar tidak hanya bergantung pada China, melainkan juga membuka peluang bagi investor lain yang memiliki standar lingkungan lebih baik.

Dalam jangka panjang, kebijakan hilirisasi harus diimbangi dengan upaya mitigasi dampak lingkungan, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Regulasi yang lebih ketat serta transparansi dalam

perizinan dan pengelolaan sumber daya dapat menjadi langkah signifikan untuk memastikan manfaat ekonomi namun tidak mengorbankan keberlanjutan.

Saran untuk penelitian selanjutnya bisa lebih fokus pada bagaimana kebijakan ini berdampak pada kesejahteraan pekerja di industri nikel dan bagaimana regulasi dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk meneliti apakah model investasi yang diterapkan saat ini benar-benar menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang atau justru memperkuat ketergantungan pada investor asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Achmad D. 2020. "Mengintip Peluang Ekonomi Maluku Utara Yang Kaya Nikel." *detikFinance*, April 13, 2020. Accessed October 10, 2024. <https://finance.detik.com/energi/d-6670726/mengintip-peluang-ekonomi-maluku-utara-yang-kaya-nikel>
- Ahdiat, Adi. 2023. "Ekspor Nikel Indonesia Meroket pada 2022, Rekor Tertinggi Sedekade." *Databoks*, July 6, 2023. Accessed October 10, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/ekspor-nikel-indonesia-meroket-pada-2022-rekor-tertinggi-sedekade>.
- Aliansi Sulawesi. 2023. *Pernyataan Sikap Aliansi Sulawesi terkait Pidato Presiden Jokowi tentang Hilirisasi Nikel*. Accessed May 23, 2025. <https://walhisulsel.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Pernyataan-Sikap-Aliansi-Sulawesi-terkait-Pidato-Presiden-Jokowi-tentang-Hilirisasi-Nikel.pdf>.
- Arvirianty, Anastasia. 2019. "Kisah Luhut & Smelter China di Balik Larangan Ekspor Nikel." *CNBC Indonesia*, Agustus 22, 2019. Accessed January 15, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190822080848-17-93787/kisah-luhut-smelter-china-di-balik-larangan-ekspor-nikel>.
- Arya, Thaus S. "Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia." *Laporan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 2022.
- Badan Pusat Statistik*. 2023. "Exports in December 2022 reached US\$23.83 billion & Imports in December 2022 reached US\$19.94 billion." Januari 16, 2023.

Accessed December 10, 2024.

<https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/01/16/1961/exports-in-december-2022-reached-us-23-83-billion---imports-in-december-2022-reached-us-19-94-billion.html>.

Betahita. 2018. "Dituding Terlibat Konflik Kepentingan di Bisnis Batubara, Ini Kata Luhut." *betahita.id*, Desember 20, 2018. Accessed October 10, 2024.

<https://betahita.id/news/detail/2754/dituding-terlibat-konflik-kepentingan-di-bisnis-batubara-ini-kata-luhut.html.html>.

Budiarti, Gustidha, and Anastasia Arvirianty. 2019. "Benarkah Smelter Nikel RI Dikuasai oleh Investor China?" *CNBC Indonesia*, 2019 Accessed April 10,

2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190823124448-494176/benarkah-smelter-nikel-ri-dikuasai-oleh-investor-china>.

CNBC INDONESIA. 2022. "Superpower! Pasar Nikel Dunia Bakal Bergantung Indonesia." *CNBC Indonesia*, April 21, 2022. Accessed June 15, 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220421163603-17-333696/superpower-pasar-nikel-dunia-bakal-bergantung-indonesia>.

CNN. 2019. "Pantai Papua Nugini Tercemar Limbah Tambang Nikel China." *CNN Indonesia*, Agustus 30, 2019. Accessed May 10, 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190829193222-113-425905/pantai-papua-nugini-tercemar-limbah-tambang-nikel-china>.

Coplin, William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

CSIS (Center for Strategic and International Studies). 2024. "Diversifying Investment in Indonesia's Mining Sector." July 11, 2024. Accessed May

25 , 2025.

<https://www.csis.org/analysis/diversifying-investment-indonesias-mining-sector>.

Dinata, Septa, Muhammad Ikhsan, Mary Silaban, and Khoirul Umam. 2020. "The Outcome of China's Investment in Indonesia: Lessons From The Nickel Industry." *Paramadina Policy Brief*.

Direktorat Statistik Industri. 2022. "Indicator of Indonesia Manufacturing Industry, 2020 - BPS-Statistics Indonesia." *Badan Pusat Statistik*, September 30, 2022. Accessed January 15, 2025. <https://www.bps.go.id/en/publication/2022/09/30/6d126e347825cd9fc5d959f7/indicator-of-indonesia-manufacturing-industry--2020.html>.

Djamhari, Eka A., Ricko Nurmansyah, Dwi R. Ningrum, Eksanti A. Kusuma, Herni Ramdlaningrum, Victoria Fanggidae, Ah Mahfutchan, Irfan T. Harja, and Andri Prasetyo. 2024. "Tracking Financing Footprint Environmental and Social Impacts of the Nickel Industry in Indonesia." *Laporan, Prakarsa*.

Earth.org. 2020. "How Rare-Earth Mining Has Devastated China's Environment." Earth.Org. Accessed October 10, 2024. <https://earth.org/rare-earth-mining-has-devastated-chinas-environment/>.

Gading, Samuel. 2024. "Investor China Ramai-ramai Investasi Nikel di RI, Ini Buktinya." *detikFinance*, January 9, 2024. Accessed October 10, 2024. <https://finance.detik.com/industri/d-7131929/investor-china-ramai-ramai-investasi-nikel-di-ri-ini-buktinya>.

Hidranto, Firman. 2023. "Indonesia Tegas Soal Hilirisasi." <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6826/indonesia-tegas-soal->

[hilirisasi?lang=1.](#)

International Energy Agency (IEA). 2022. *Global EV Outlook 2022*. Accessed October 10, 2024.

<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022>.

International Monetary Fund. *Indonesia: 2023 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia*. Washington, DC: International Monetary Fund, 2023.

Isnainul, Ok, Elvira Fitriyani Pakpahan, Michelle Hadlen, Michael, Danniell, and Cindy Winni Violita. 2020. “Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Jatam. 2018. “Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara.” Accessed October 10, 2024.

<https://jatam.org/wp-content/uploads/2018/12/COALRUPTION.pdf>.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). 2023. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Sektor Minerba*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Kompas. 2019. “Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024.” *KOMPAS.com*, August 31, 2019. Accessed January 15, 2025.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>.

Kompas. 2021. “Kunjungan Ke China, Ini Oleh-Oleh Luhut untuk Indonesia.” *KOMPAS.com*, Juni 7, 2021. Accessed January 15, 2025.

<https://money.kompas.com/read/2021/06/07/202358826/kunjungan-ke-china-ini-oleh-oleh-luhut-untuk-indonesia>.

Kompas Data. 2018. “Hilirisasi Nikel Indonesia: Nilai Ekspor Indonesia Meningkatkan

- Drastis.” *data.kompas.id*, 2018. Accessed April 10, 2024.
https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/64101244152c9dcb7c7e698e?currentpage=1&size=10&typesearch=4.
- Kurniawan, Haris. 2020. “Pertemuan Konsultasi ke-22 AEM, Mendag: Tiongkok Mitra Terbesar ASEAN.” *Merdeka.com*.
- Luttrel, Christopher, and Resosudarmo. 2014. “The Political Economy of Coal Mining in Indonesia.” *Resources Policy Journal*.
- Media Nikel Indonesia. 2020. “Asa Hilirisasi Sang Raja Nikel Dunia.” *Media Nikel Indonesia*, November 9, 2020. Accessed April 10, 2024.
<https://nikel.co.id/2020/11/09/asa-hilirisasi-sang-raja-nikel-dunia/>.
- Media Nikel Indonesia. 2020. “Cadangan Nikel Indonesia Terbesar Dunia.” *Databoks*. Accessed April 10, 2024.
<https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/statistik/1446ce41e70b6ec/cadangan-nikel-indonesia-terbesar-dunia>.
- Mercusuar. 2021. “Tiga Menteri Kunjungi IMIP, Bahas Perizinan dan Mobil Listrik.” *harian mercusuar*, Juni 23, 2021. Accessed October 10, 2024.
<https://mercusuar.web.id/morowali-morut/tiga-menteri-kunjungi-imip-bahas-perizinan-dan-mobil-listrik/>.
- Mukete, Beyongo. n.d. “China’s Environmental Footprint: The Zambian Example.” *The China Story*. Accessed July 17, 2024. Accessed October 10, 2024.
<https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2016/forum-diasporic-dilemmas/chinas-environmental-footprint-the-zambian-example/>.
- Muliati, Firda D. 2023. “Banyak Pabrik Nikel RI Dibangun Investor China, Ini

- Alasannya.” *CNBC Indonesia*, August 18, 2023. Accessed April 10, 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230818143716-4-464117/banyak-pabrik-nikel-ri-dibangun-investor-china-ini-alasannya>.
- Muliati, Firda D. 2024. “Luhut Ungkap Bakal Ada Kerjasama dengan China, Nilainya Fantastis.” *CNBC Indonesia*, June 26, 2024. Accessed January 10, 2025.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240626105240-4-549409/luhut-ungkap-bakal-ada-kerjasama-dengan-china-nilainya-fantastis>.
- Pahlevi, Reza. 2022. “Cek Data: Benarkah 90% Tambang Nikel Indonesia Dikuasai Cina?” Desember 2, 2022. Accessed June 15, 2024.
<https://katadata.co.id/cek-data/63896f1798730/cek-data-benarkah-90-tambang-nikel-indonesia-dikuasai-cina>.
- PKS. 2022. “Hilirisasi Nikel Anggap Untungkan Cina, Legislator PKS: Harusnya Dinikmati Rakyat Indonesia.” *Fraksi Pks*.
- Purwanti, Teti. 2022. “Perusahaan Tambang China yang Investasi di RI, Ini Daftarnya.” *CNBC Indonesia*, August 7, 2022. Accessed October 10, 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220807113258-17-361709/perusahaan-tambang-china-yang-investasi-di-ri-ini-daftarnya>.
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riedho, M Roehman z. 2024. “Strategi Tiongkok dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel oleh Pemerintah Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.

- Rigg, and James Derek. 2016. "Environmental Impact of Mining in the Tropical Areas: Case Studies from Southeast Asia." *Environmental Development Journal*.
- Roger Merino. 2022. "The Politics of Localizing Human Rights: Chinese Policies and Corporate Practices in Latin America." *Business and Human Rights Journal*. (November).
- Rosada, Farah, Raden A. Arya, and Arie K. Paksi. 2023. "The Impact of Indonesia-China Nickel Cooperations on Indonesia's Economy and Environment." *Journal of International Studies*. 6 (2).
- Scissors, Derek. 2023. *China Global Investment Tracker*. American Enterprise Institute. Accessed May 23, 2025.
<https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>.
- Shiddiq. 2024. "Hilirisasi Nikel: Kunci Indonesia dalam Membangun Ekosistem EV Global." Desember, 2024. Accessed October 10, 2024.
<https://nikel.co.id/2024/12/20/hilirisasi-nikel-kunci-indonesia-dalam-membangun-ekosistem-ev-global/>.
- Singgih, Viriya. 2024. "Hilirisasi nikel: Setumpuk masalah di balik ketergantungan Indonesia terhadap investasi China - 'Demam nikel membuat pemerintah kehilangan akal sehat.'" *BBC*, January 29, 2024. Accessed April 10, 2024.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4m1k0j7vro>.
- Suara Bogor. 2022. "Puan Maharani Dorong Peningkatan Investasi Tiongkok, Ridwan Kamil Malah Sebut Harus Hati-hati dengan China." 2022. Accessed April 10, 2024.
<https://bogor.suara.com/read/2022/10/06/115101/puan-maharani-dorong->

[peningkatan-investasi-tiongkok-ridwan-kamil-malah-sebut-harus-hati-hati-dengan-china.](#)

Syarifuddin, Nurhayati. 2022. “Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali.” *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman*.1 (2).

Tela, Irvan A., and Zhang Yu. 2025. “Examining the Global Perception of Nickel Mining Environmental Impact: A Case Study of China-Indonesia Public Opinion on Earth's Sustainability.” *Atlantis Press*.

Tempo. 2020. “Kritik Smelter Milik Cina, Gerindra: Peraturan Dianggap Bungkus Kacang Goreng.” *Tempo*, September 29, 2020. Accessed June 15, 2024. [https://www.tempo.co/ekonomi/kritik-smelter-milik-cina-gerindra-peraturan-dianggap-bungkus-kacang-goreng-577923.](https://www.tempo.co/ekonomi/kritik-smelter-milik-cina-gerindra-peraturan-dianggap-bungkus-kacang-goreng-577923)

Tempo. 2022. “Bamsuet Apresiasi Perusahaan Besar Dunia Investasi Nikel di Indonesia.” 2022. Accessed October 10, 2024. [https://www.tempo.co/info-tempo/bamsuet-apresiasi-perusahaan-besar-dunia-investasi-nikel-di-indonesia-327374.](https://www.tempo.co/info-tempo/bamsuet-apresiasi-perusahaan-besar-dunia-investasi-nikel-di-indonesia-327374)

Wicaksono, Raden A., and Aryo Bhawono. 2020. “Indonesia Tanah Nikel China.” *Betahita*, September 2, 2020. Accessed April 10, 2024. [https://betahita.id/news/detail/10567/indonesia-tanah-nikel-china.html?v=1726060353.](https://betahita.id/news/detail/10567/indonesia-tanah-nikel-china.html?v=1726060353)